



PER-21/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2021

**TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT**



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**



6 Substansi Perubahan

- 1 Surat Penetapan Pejabat Bea dan Cukai
- 2 Pengecualian Penggunaan Dokumen TPB
- 3 Dokumen TPB Berkala
- 4 Pengaturan *Unmanifest*
- 5 Pengaturan Ketentuan Larangan/Pembatasan
- 6 Penggunaan Barang Sebagian

Mengubah 6 Pasal dan 2 Lampiran

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Pasal 1
(Ketentuan Umum) | 5 | Pasal 24
(Pemasukan Barang Impor ke TPB Jalur Merah) |
| 2 | Pasal 2
(Dokumen TPB) | 6 | Pasal 47
(Penetapan Pejabat Bea dan Cukai) |
| 3 | Pasal 4
(Penyampaian Dokumen TPB Berkala) | 7 | Lampiran II (Tata Cara) dan Lampiran XI (Bentuk Formulir) |
| 4 | Pasal 12
(Penjaluran Dokumen TPB) | | |

Menambah 4 Pasal Baru

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Pasal 19A (<i>Unmanifest</i>) | |
| 2 | Pasal 25A | } (Penggunaan Barang Sebagian) |
| 3 | Pasal 25B | |
| 4 | Pasal 25C | |
| | | |



SURAT PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

BEFORE



AFTER

Pasal 1 angka 16

Surat Penetapan Pejabat



SPTNP, SPP,
dan/atau SPSA



STCK-1

Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 16



SPBL

Pasal 1 angka 17



SPTNP

Pasal 47

ayat (1)

Kekurangan/
Kelebihan
pembayaran

Surat Penetapan
Pejabat

Penelitian tarif/
nilai pabean

Jalur
Kuning/
Merah

Kekurangan
pembayaran

SPTNP dan
SPPB TPB

ayat (2)

Pasal 47

ayat (1)

Kekurangan/
Kelebihan
pembayaran

SPTNP

Penelitian tarif/
nilai pabean

Jalur
Kuning/
Merah

Kekurangan
pembayaran
dan/atau
terkena lartas

SPTNP,
SPBL,
dan/atau
SPPB TPB

ayat (2)

Jalur
Hijau

30 Hari

Rekomendasi
Penul/Audit/P2

ayat (3)



BEFORE



AFTER

Pasal 2 ayat (4)

Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan juga oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang dibekukan izinnya

Pasal 2 ayat (4)

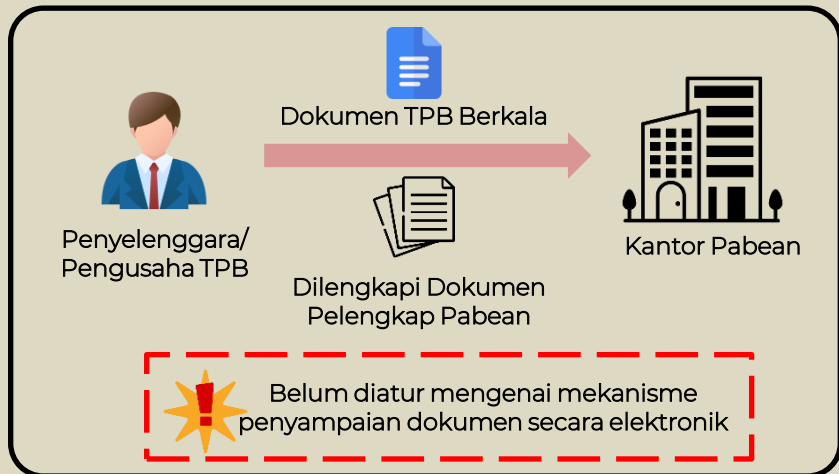
Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan juga oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB yang dibekukan izinnya, **kecuali terhadap pemasukan barang dengan mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, meliputi:**

- a. pemasukan barang dari luar daerah pabean;
- b. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean, kecuali pengembalian atas barang yang telah dikeluarkan sementara; atau
- c. pemasukan barang dari TPB lainnya, kecuali pengembalian atas barang yang telah dikeluarkan sementara.

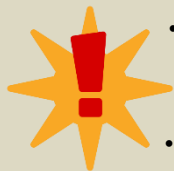


Pasal 4

BEFORE

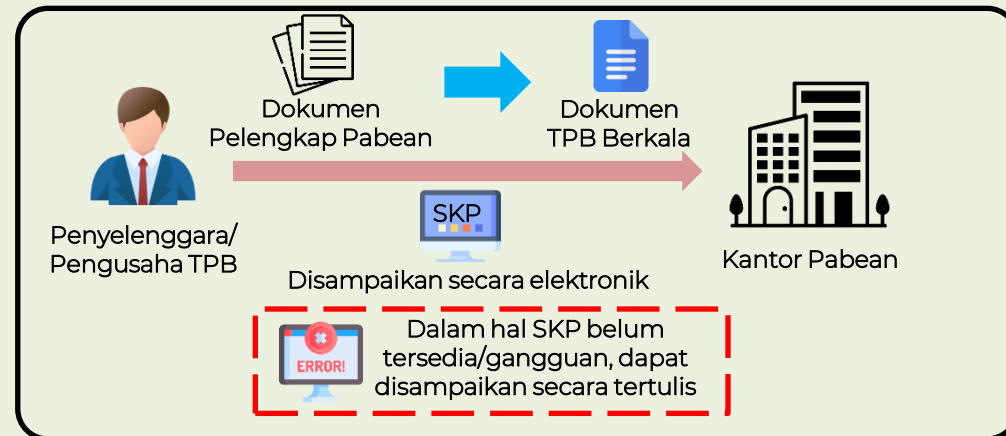


Penyampaian Dokumen TPB berkala dikecualikan untuk:

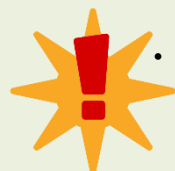


- pengeluaran barang dari TPB ke TLDDP untuk pengeluaran sementara dan/atau
- pemasukan kembali barang eks pengeluaran sementara dari TLDDP

AFTER



Penyampaian Dokumen TPB berkala dikecualikan untuk:



- pemasukan barang impor dari Kawasan Pabean ke TPB
- pengeluaran barang dari TPB ke TLDDP untuk pengeluaran sementara dan/atau
- pemasukan kembali barang eks pengeluaran sementara dari TLDDP

Pasal 4

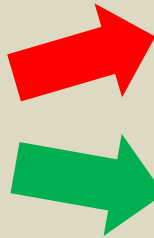


Pasal 12 ayat (1)

BEFORE



Dokumen
TPB



Jalur Merah

Jalur Hijau

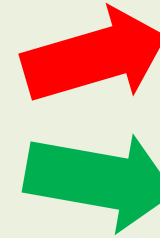


Belum diatur mengenai
penjaluran atas
Dokumen TPB berkala

AFTER



Dokumen
Pelengkap
Pabean



Jalur
Merah

Jalur
Hijau



Dokumen
TPB berkala

Kumpulan Dokumen Pelengkap Pabean



Dalam hal Dokumen TPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Dokumen TPB berkala,
penjaluran dilakukan atas Dokumen
Pelengkap Pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Pasal 12 ayat (2a)



BEFORE



Pasal 19

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS salah satunya dilakukan **setelah pos BC 1.1 telah ditutup** oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola manifes atau SKP Manifes di Kantor Pembongkaran



Penyampaian pos BC 1.1 diberlakukan umum tanpa adanya pengecualian



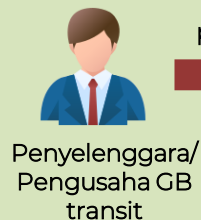
AFTER

Pasal 19A

ayat (1)

Kegiatan pemasukan kembali barang ekspor asal **Gudang Berikat transit** dapat dilakukan **tanpa** penyampaian data pos/subpos BC 1.1

ayat (2)



Mengajukan
permohonan



Kepala Kanwil/
Kepala KPU

5 HK



ayat (5)



Persetujuan
(mekanisme perlakuan
tertentu)

atau

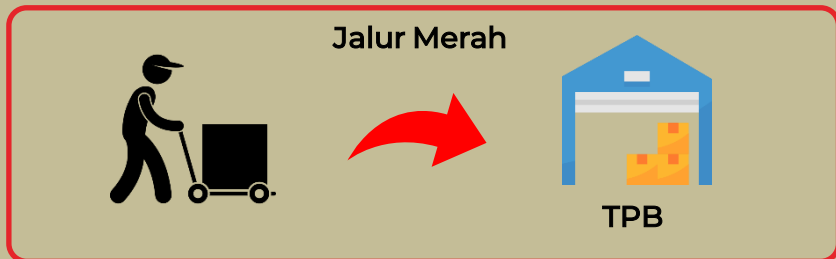


Penolakan



Pasal 24

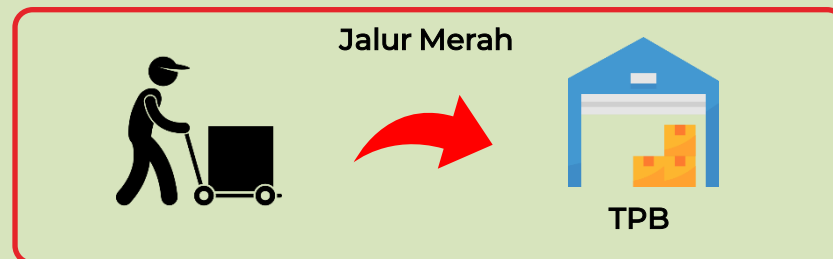
BEFORE



Belum ada pengaturan mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan

AFTER

Pasal 24



ayat (7a)



Dalam hal terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk keperluan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan barang terkena larangan dan/atau pembatasan dengan menerbitkan SPBL

ayat (10)



BEFORE



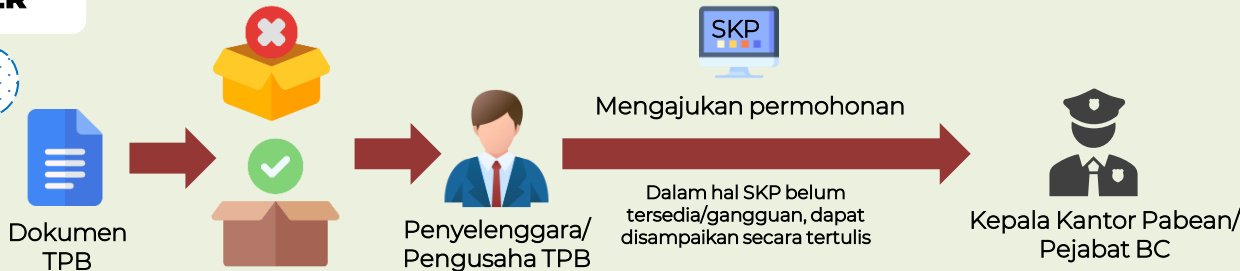
Jika dalam dokumen BC 2.3 sebagian jumlah dan jenis barang terkena lartas, atas dokumen BC 2.3 tersebut tidak dapat diterbitkan SPPD sebelum lartasnya dipenuhi



Belum ada pengaturan terkait penggunaan barang sebagian

AFTER

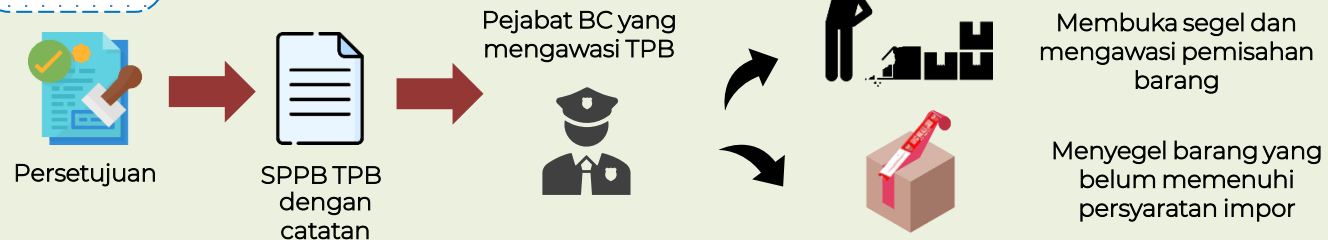
Pasal 25A



Pasal 25B

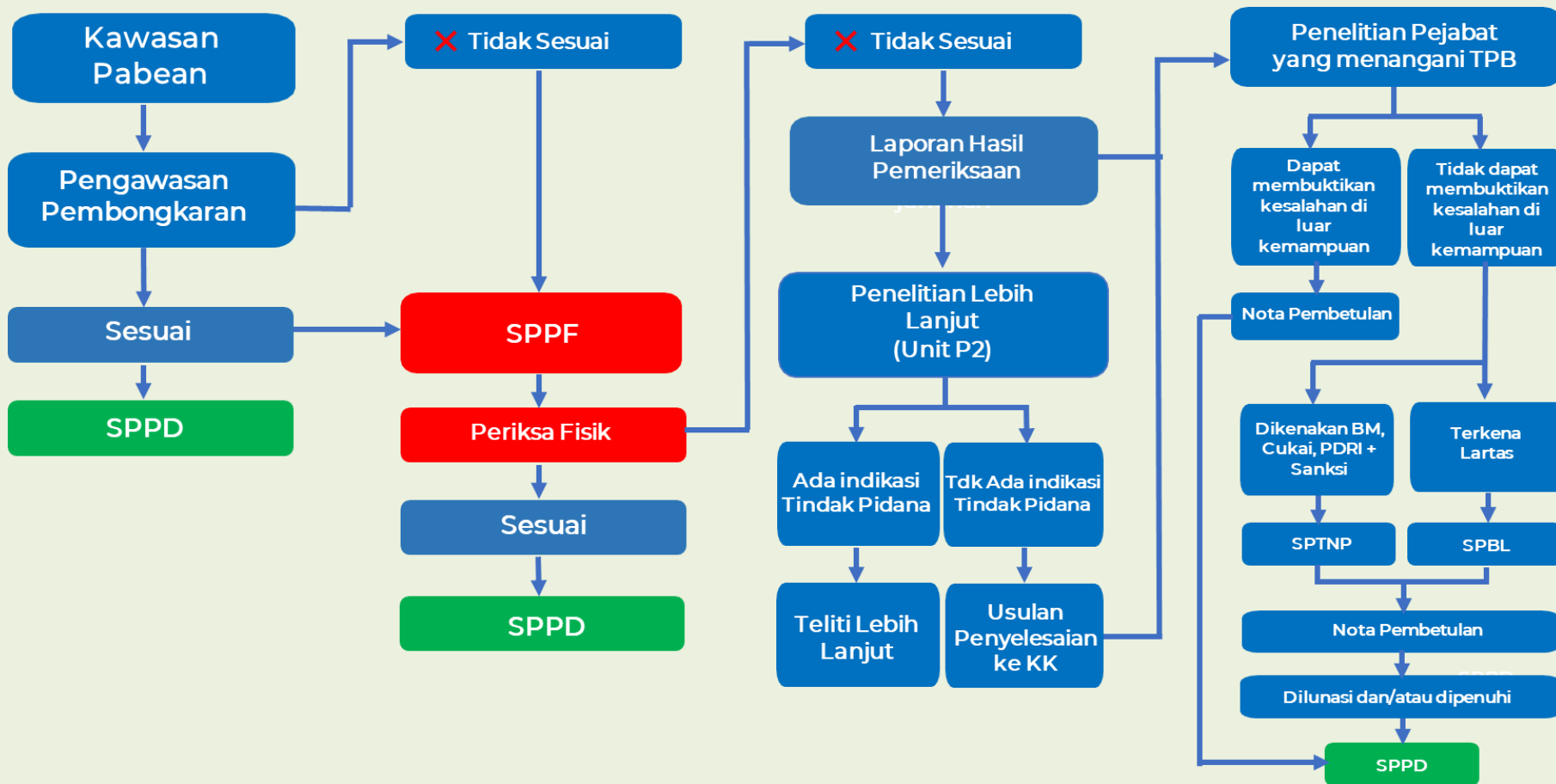


Pasal 25C



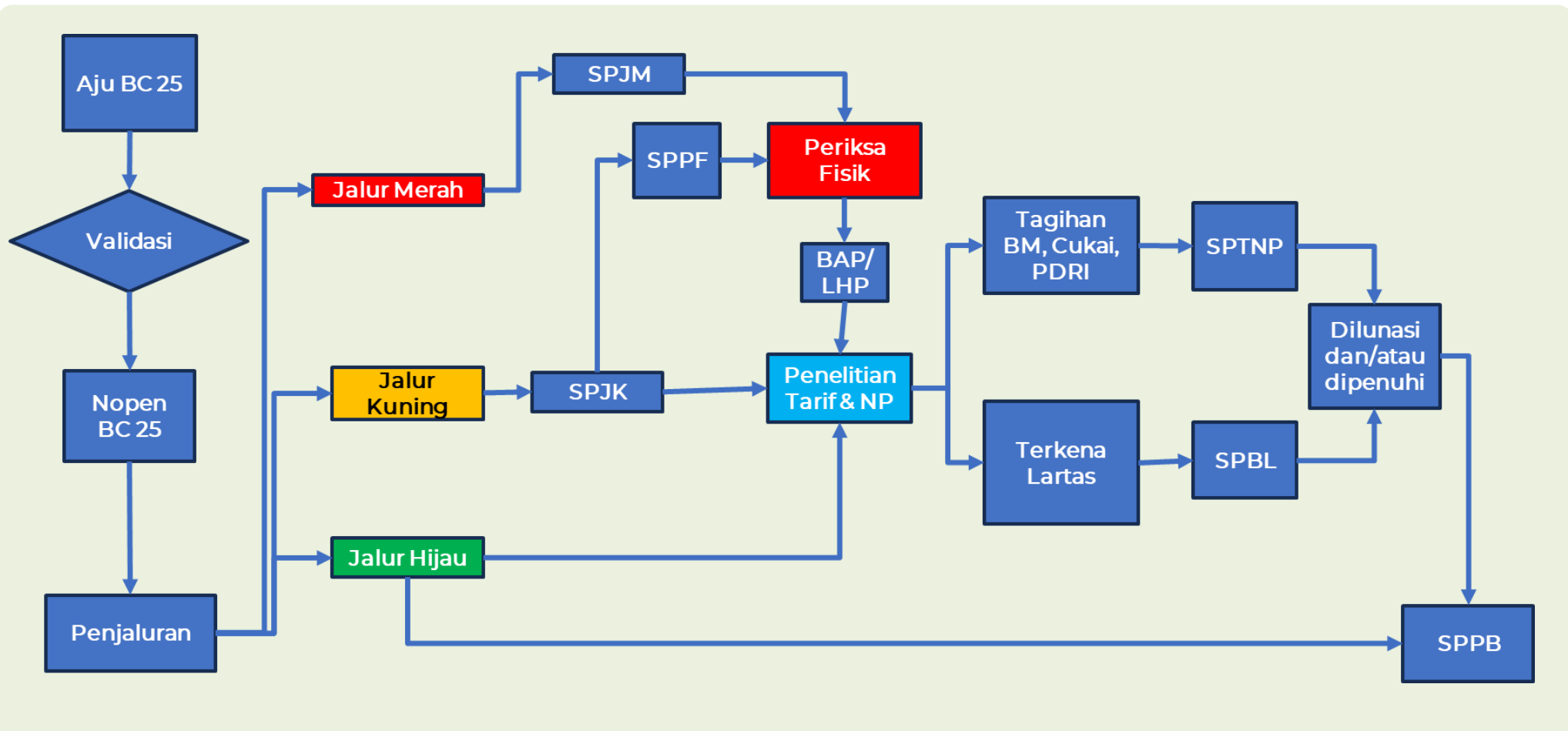


PEMASUKAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN KE TPB (BC 2.3)





PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB KE TLDDP (BC 2.5)





TERIMA KASIH

